

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2020

Nabila Ramadhani^{*1}, Yuni Prihadi Utomo²

^{1,2}Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: b300190086@student.ums.ac.id

Abstract.

One way to measure the success of the performance of a region in the field of human development is to use the Human Development Index (IPM). This study aims to observe the direction and magnitude of the influence of the Gender Development Index, the number of people working, district minimum wages, economic growth, health sector government spending, and education sector government spending on the Human Development Index (IPM) in East Java in 2010-2020. The data analysis tool used is panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of the study show that the variables Gender Development Index, District/City Minimum Wage, and Health Sector Government Expenditures have a significant positive effect on the Human Development Index. Meanwhile, the Number of Employed People, Economic Growth, and Government Expenditures in the Education Sector have no influence on the Human Development Index in East Java. The highest HDI was identified in Madiun City, while the lowest HDI was in Sampang Regency.

Keywords: IPM, IPG, UMK, Growth, Government Expenditures

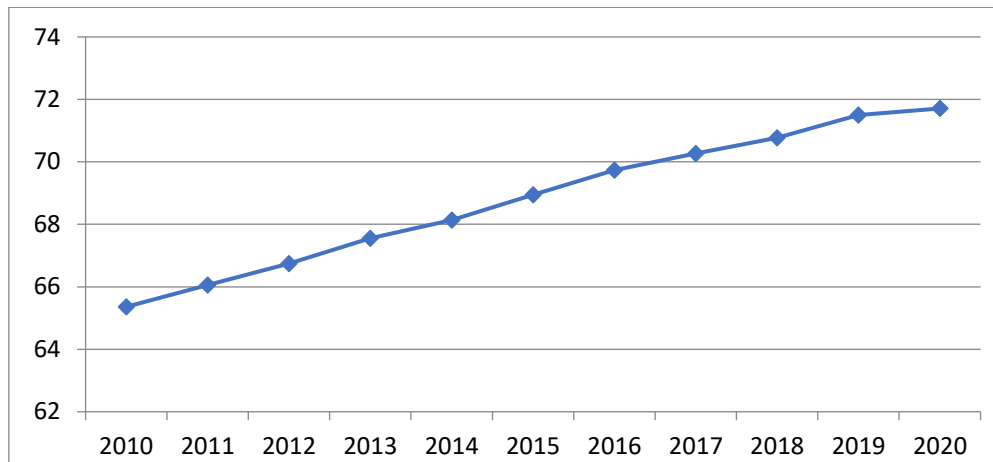
1. PENDAHULUAN

Salah satu aspek dari pembangunan adalah pembangunan manusia, pembangunan manusia menjadi penting dan mendapat perhatian di karenakan pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan seperti kemiskinan dan taraf hidup masyarakat yang luas, sehingga keberhasilan pembangunan sering kali dilihat dari pencapaian kualitas sumber daya manusia (SDM). Todaro dan Smith (2013). Pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara fisik bermakna sebagai peningkatan kapasitas berupa kecukupan, jati diri, dan kebebasan dasar penduduk yang kemudian akan meluas dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat menikmati hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia juga harus dilakukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus agar terwujudnya pembangunan daerah yang baik.

Berdasarkan data BPS secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur selama periode 2010-2020 mengalami peningkatan yang baik. Grafik 1 memperlihatkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2010 hingga 2020.

Grafik 1
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan Grafik 1 dapat dilihat bahwa tingkat IPM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 hingga 2020 mengalami peningkatan kenaikan IPM yang dimulai dari tahun 2010 yang hanya berada pada angka 65,36 hingga pada tahun 2020 mencapai peningkatan di angka 71,71 jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kenaikan IPM Jawa Timur berada hampir mendekati rata-rata IPM Indonesia yang berada pada angka 71,94. Namun, dari adanya peningkatan tersebut ada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang masih mengalami kesenjangan antara lain Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lumajang yang pada tahun 2020 berada pada angka IPM 62,70 dan 65,46, sehingga perlu diperhatikan lagi aspek penting dalam menunjang pembangunan manusia melalui pengetahuan, pendidikan, dan kesehatan.

Amartya Sen dalam Dusche (2012), menjelaskan pembangunan digunakan sebagai sarana kebebasan instrumental yang dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling melengkapi seperti: kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, jaminan transparansi, dan perlindungan keamanan. Kebebasan instrumen ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk pemerataan manusia untuk mendapatkan penghidupan yang cukup atas pemenuhan kebutuhan dasar sehingga pembangunan menjadi hal penting dalam jaminan bagi setiap golongan manusia.

Todaro dalam Mahroji dan Nurkhasanah (2019), menjelaskan bahwa teori pertumbuhan ekonomi menekankan peran penting pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia sekaligus pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa diperlihatkan melalui pengetahuan dan keterampilan karena semakin tinggi kualitas manusia maka semakin meningkat pula pengetahuan dan keahlian sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja manusia tersebut.

Mahbub Ul Haq berpendapat bahwa dalam paradigma pembangunan manusia merupakan hal yang dilakukan secara keseluruhan mencakup masalah pembangunan termasuk pertumbuhan ekonomi, investasi sosial, pemberdayaan masyarakat, penyediaan kebutuhan dasar dan jaringan pengamanan sosial serta kebebasan politik dan budaya di semua aspek kehidupan masyarakat. Haq (1995)

Rostow menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan manfaat intrinsik karena pendidikan dan kesehatan memiliki peranan yang besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Menurut Rostow untuk mencapai kesejahteraan dalam pembangunan ada lima tahap yakni: masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, dorongan menuju kedewasaan usia, dan konsumsi masal yang tinggi. Todaro dan Smith (2011)

Berdasarkan latar belakang di muka, penelitian ini akan mengamati arah dan besarnya pengaruh Indeks Pembangunan Gender, jumlah orang yang bekerja, upah minimum Kabupaten, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur tahun 2010-2020.

II. METODE

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPG_{it} + \beta_2 EMP_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 GROWTH_{it} + \beta_5 PPS_{it} + \beta_6 PPD_{it} + \varepsilon_t$$

di mana :

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IPG	= Indeks Pembangunan Gender (%)
EMP	= Jumlah Orang yang Bekerja (Jiwa)
UMK	= Upah Minimum Kabupaten (Rupiah)
GROWTH	= Pertumbuhan Ekonomi (%)
PPS	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Rupiah)
PPD	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rupiah)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$	= Koefisien regresi variabel independen
i	= Kabupaten/ Kota ke i Provinsi Jawa Timur
t	= Tahun ke t
ε	= <i>Error term</i> (faktor kesalahan)

Model ekonometrik di atas merupakan kombinasi dari model ekonometrik Hidayat dan Tarihoran (2020), Indrayana (2021), Feriyanto (2016), dan Charitin (2021). Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPS), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPD), Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH), dan Jumlah Orang yang Bekerja (EMP) diduga memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) diduga memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data yang dipakai bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data *time series* dari tahun 2010-2020, sedangkan data *cross section* yang digunakan yaitu 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Jumlah Orang Bekerja (EMP), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPS), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPD).

Tahap estimasi analisis regresi data panel meliputi: estimasi parameter model ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*; pemilihan model terestimasi terbaik Uji Chow dan Uji Hausman, dan jika diperlukan Uji *Lagrange Multiplier*; Uji Kebaikan model pada model terestimasi terpilih; dan Uji Validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross Section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	-63,41786	-20,14629	-13,74648
<i>IPG</i>	0,687427	0,155271	0,242835
<i>LOG(EMP)</i>	-1,745872	-0,059221	-0,264970
<i>LOG(UMK)</i>	5,590797	3,644366	3,931019
<i>GROWTH</i>	0,142920	-0,011707	-0,004890
<i>LOG(PPS)</i>	-0,579287	0,991024	0,741914
<i>LOG(PPD)</i>	1,063171	-0,052045	-0,390306
<i>R²</i>	0,696365	0,986599	0,876774

<i>Adjusted R²</i>	0,691911	0,985050	0,874966
Statistik <i>F</i>	156,3353	636,8993	485,0161
Prob. Statistik <i>F</i>	0,000000	0,000000	0,000000
Uji Pemilihan Model			
Chow			
Cross-section $F(37, 372) = 1298,120083$; Prob. $F(37, 372) = 0,0000$			
Hausman			
Cross section random $\chi^2(6) = 101,947412$; Prob. $\chi^2(6) = 0,0000$			

Sumber: BPS, diolah.

Uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan bahwa (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik, terlihat dari probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* dan statistik 2 yang keduanya bernilai 0,0000 ($< 0,01$). Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi FEM, terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2
Model Estimasi *Fixed Effects Model (FEM)*

$IPM_{it} = -20,14629 + 0,155271 IPG_{it} - 0,059221 \log(EMP)_{it} + 3,644366 \log(UMK)_{it}$			
	(0,0000)*	(0,7020)	(0,0000)*
$- 0,011707 GROWTH_{it} + 0,991024 \log(PPS)_{it} - 0,052045 \log(PPD)_{it}$			
	(0,3775)	(0,0000)*	(0,8168)
$R^2 = 0,986599$; $DW = 1,039159$; $F = 636,8993$; Prob. $F = 0,0000$			

Sumber: Lampiran 1. **Keterangan:** *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik *t*.

Tabel 3
Efek dan Konstanta Wilayah

No	Wilayah	Efek	Konstanta
1	Kabupaten Pacitan	-1,654994	-21,801284
2	Kabupaten Ponorogo	-0,782454	-20,928744
3	Kabupaten Trenggalek	-1,512469	-21,658759
4	Kabupaten Tulungagung	0,725025	-19,421265
5	Kabupaten Blitar	-0,680346	-20,826636
6	Kabupaten Kediri	-0,019634	-20,165924
7	Kabupaten Malang	-2,990470	-23,136760
8	Kabupaten Lumajang	-4,998248	-25,144538
9	Kabupaten Jember	-5,084614	-25,230904
10	Kabupaten Banyuwangi	-0,230150	-20,376440
11	Kabupaten Bondowoso	-4,570772	-24,717062
12	Kabupaten Situbondo	-3,371241	-23,517531
13	Kabupaten Probolinggo	-4,879995	-25,026285
14	Kabupaten Pasuruan	-6,039322	-26,185612
15	Kabupaten Sidoarjo	5,111084	-15,035206
16	Kabupaten Mojokerto	0,197529	-19,948761
17	Kabupaten Jombang	0,127856	-20,018434
18	Kabupaten Nganjuk	0,375451	-19,770839
19	Kabupaten Madiun	0,623859	-19,522431
20	Kabupaten Magetan	2,582132	-17,564158
21	Kabupaten Ngawi	-0,260841	-20,407131

22	Kabupaten Bojonegoro	-3,005204	-23,151494
23	Kabupaten Tuban	-3,625377	-23,771667
24	Kabupaten Lamongan	0,997137	-19,149153
25	Kabupaten Gresik	2,537157	-17,609133
26	Kabupaten Bangkalan	-6,840606	-26,986896
27	Kabupaten Sampang	-8,729556	-28,875846
28	Kabupaten Pamekasan	-3,650000	-23,796290
29	Kabupaten Sumenep	-4,384246	-24,530536
30	Kota Kediri	5,774551	-14,371739
32	Kota Blitar	6,446521	-13,699769
32	Kota Malang	9,389673	-10,756617
33	Kota Probolinggo	1,306532	-18,839758
34	Kota Pasuruan	3,435371	-16,710919
35	Kota Mojokerto	6,193556	-13,952734
36	Kota Madiun	10,46694	-9,679350
37	Kota Surabaya	7,305977	-12,840313
38	Kota Batu	5,042549	-15,103741

Sumber: Lampiran 1, diolah.

Dari Tabel 2 terlihat model terestimasi FEM eksis dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0000 ($< 0,01$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9865; yang menunjukkan model terestimasi FEM memiliki daya ramal yang sangat tinggi. Secara terpisah dari enam variabel dalam model ekonometrik, tiga variabel yakni variabel Indeks Pembangunan Gender, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, semuanya dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik t sebesar 0,0000 ($< 0,01$).

Variabel Indeks Pembangunan Gender memiliki koefisien regresi sebesar 0,155271, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Indeks Pembangunan Gender naik sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,155271%. Sebaliknya, jika Indeks Pembangunan Gender turun sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar 0,155271%.

Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki koefisien regresi sebesar 3,644366, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila Upah Minimum naik sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,03644%. Sebaliknya, jika Upah Minimum Kabupaten/Kota turun sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia akan turun sebesar 0,03644%.

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan memiliki koefisien regresi sebesar 0,991024, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan naik sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,00991%. Sebaliknya, jika Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan turun sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia akan turun sebesar 0,00991%.

Nilai konstanta masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai konstanta tertinggi dimiliki Kota Madiun, yaitu sebesar -9,67935. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Indeks Pembangunan Gender, Jumlah Orang yang Bekerja, Upah Minimum Kabupaten, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka Kota Madiun cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Setelah Kota Madiun, dua Kabupaten dengan konstanta terbesar adalah Kota Malang dan Kota Surabaya.

Nilai konstanta terendah dimiliki Kabupaten Sampang, yaitu sebesar -28,875846. Terkait dengan pengaruh variabel Indeks Pembangunan Gender, Jumlah Orang yang Bekerja, Upah Minimum Kabupaten, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Sampang cenderung memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Setelah Kabupaten Sampang, dua kabupaten dengan konstanta terendah adalah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pasuruan.

Interpretasi Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia di berbagai Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2010-2020 ternyata dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPS). Sementara itu, variabel Jumlah Orang yang Bekerja (EMP), Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPD) tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

Indeks Pembangunan Gender memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan, perubahan kenaikan pada IPG akan meningkatkan nilai IPM Jawa Timur. Indeks Pembangunan Gender merupakan salah satu indikator pencapaian pembangunan manusia. Kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa adanya kesetaraan gender. Hal ini tampaknya menjadi persepsi seluruh negara, untuk memastikan diakhirinya segala diskriminasi gender agar negara dapat maju melalui pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya pembangunan menekankan pada akumulasi modal sumber daya manusia, karena sumber daya manusia memegang peranan penting sebagai wahana pembangunan. Peran tersebut diwujudkan melalui peningkatan pengetahuan, kesehatan dan gizi yang baik. Kesetaraan gender memiliki peran sentral dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan bagi perempuan memiliki dampak tambahan yang positif, diantaranya penurunan pernikahan dini, tingkat kematian anak, serta pendidikan anak yang lebih tinggi. Hal ini dengan sendirinya akan mendorong perspektif pertumbuhan pembangunan manusia jangka panjang pada suatu negara/wilayah.

Jumlah Orang yang Bekerja ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia yang tinggi belum tentu menjamin daya serap tenaga kerja, karena kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan tidak sesuai karena perusahaan cenderung mencari tenaga kerja yang upahnya tidak terlalu tinggi. Hal ini terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi upah dari sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian, peningkatan angka pekerja ini tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, kenaikan upah akan menyebabkan IPM meningkat. Dimensi kehidupan layak diukur melalui rata-rata besarnya pengeluaran per kapita, berdasarkan pengeluaran masyarakat yang dilihat dari upah yang didapat. Apabila masyarakat suatu daerah rata-rata pengeluaran per kapitanya tinggi maka hal tersebut menggambarkan daya beli masyarakat juga tinggi terhadap sejumlah kebutuhan makanan pokok dan bukan makanan. Hal ini menandakan bahwa pendapatan masyarakat tinggi. Apabila dimensi tersebut semakin naik setiap tahunnya maka pembangunan manusia disuatu daerah dirasa sudah berhasil. Dengan kata lain, peningkatan upah akan meningkatkan IPM.

Pertumbuhan Ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karenanya dengan pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat meningkatkan IPM di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Angka harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas di daerah tersebut. Pemerataan distribusi pendapatan masyarakat diperlukan dalam proses peningkatan pembangunan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik sehingga menurunkan produktivitasnya.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan ditemukan memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, kenaikan pengeluaran pemerintah akan memberikan efek positif pada IPM. Investasi yang tepat di bidang kesehatan akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia. Penggunaan alokasi untuk pembangunan gedung kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta pengadaan obat dan alat-alat kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat. Peningkatan kepedulian masyarakat tentang cara hidup sehat juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan suatu wilayah yang tinggi menandakan wilayah tersebut memiliki perekonomian yang baik.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Investasi pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan pembangunan manusia sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai. Namun, alokasi yang tidak tepat sasaran tidak memberikan dampak signifikan terhadap dunia pendidikan. Alokasi anggaran yang ada masih lebih besar digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana. Investasi

di bidang pendidikan masih harus mendapat perhatian untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah khususnya dari alokasi belanja pemerintah pusat.

IV. KESIMPULAN

Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Model terestimasi ini eksis dengan R^2 sebesar 0,9865. Secara terpisah Indeks Pembangunan Gender, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Jumlah Orang yang Bekerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. IPM tertinggi teridentifikasi pada Kota Madiun, sedangkan IPM terendah dimiliki Kabupaten Sampang.

Indeks Pembangunan Gender menjadi salah satu faktor penentu pencapaian pembangunan manusia. Diskriminasi gender dalam berbagai hal menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Di berbagai bidang contohnya pendidikan, capaian pembangunan telah menunjukkan kesetaraan. Namun di bidang ekonomi, kesenjangan gender masih terjadi pada partisipasi angkatan kerja dan upah. Dengan adanya kesetaraan gender, dapat berimbas pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Upah Minimum Kabupaten/Kota memberikan efek positif terhadap IPM di Jawa Timur. Peningkatan upah minimum Kabupaten/Kota meningkatkan kesejahteraan pekerja semakin baik, dimana ia dapat memperoleh pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang produktivitasnya. Seperti memperoleh pendidikan yang lebih baik, ataupun akses kesehatan yang lebih memadai. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap IPM di Jawa Timur. Pengeluaran untuk kesehatan yang tepat akan berdampak positif bagi pembangunan manusia. Penggunaan dana untuk fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang tinggi untuk kesehatan di suatu daerah menunjukkan ekonomi yang baik.

Diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menggunakan hasil kajian ini sebagai pedoman untuk mempertimbangkan insentif peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat mengurangi diskriminasi gender agar Indeks Pembangunan Manusia dapat meningkat. Lalu, pemerintah daerah masih perlu menaikkan upah minimum Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota diharapkan masyarakat memiliki daya beli yang lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga dengan terwujudnya kondisi tersebut diharapkan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan Indeks Pembangunan Manusia melalui pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, cara terbaik adalah meningkatkan anggaran kesehatan tepat sasaran berdasarkan program-program prioritas bagi masyarakat. Dan melakukan pemantauan berbasis teknologi terhadap setiap anggaran yang digunakan. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah variabel bebas yang banyak dan jangka waktu yang panjang, sehingga hasil penelitiannya akan jauh lebih baik.

REFERENSI

- Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3>
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A>
- Charitin, D. (2021). Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Tingkat Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan. *Jurnal Ekonomika*, 12(01), 51–64.
- Diba, S. P. S., Kawung, G. M. V, & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 13–22.
- Dusche, M. (2012). Development as Freedom. In *Identity Politics in India and Europe*. Knopf Doubleday Publishing Group. <https://doi.org/10.4135/9788132108009.n31>
- Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 27–44

- Feriyanto, N. (2016). The effect of employment, economic growth, and investment on HDI: In provinces in Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.14414/jebav.v19i1.537>
- Feriyanto, N., Indonesia, U. I., & Utara, R. (2016). *IPM: Di provinsi-provinsi di Indonesia* Machine Translated by Google. 19(1), 1–12.
- Handalani, R. T. (2018). Determinant of Human Development Index in Southeast Asia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(2), 118–137. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v2i2.44>
- Haq, M. ul. (1995). *Reflections on Human Developmet*.
- Hidayat, A., & Tarihoran, N. (2020). Pengaruh Penggunaan Metode Qiro'Ati Dan Peran Teman Sebaya Terhadap Kemampuan Tahsin Al-Qur'an Siswa. *Qathrunâ*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.32678/qathruna.v7i2.3145>
- Indrayana, A. (2021). ... Analysis Of Economic Growth, The Government Spending Educationsector, Health Sector, And Infrastructure Sector On Human Development Index In East Java. *Ajhssr.Com*, 10, 33–39. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/10/E215103339.pdf>
- Kinarsih, & Abdullah, F. (2020). Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE). *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(2), 339–353.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>
- Panggabean, M. (2014). The Influence of Private Investment, Human Development Index (HDI), and Local Government Capital Expenditure (LGCE) on the Economic Growth and *International Journal of African and Asian Studies: An ...*, 142–150. <https://core.ac.uk/download/pdf/234689808.pdf>
- Pradana, A. N., & Sumarsono, H. (2018). Human Development Index, Capital Expenditure, Fiscal Desentralization to Economic Growth and Income Inequality in East Java Indonesia. *Quantitative Economics Research*, 1(2), 108–118.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*.
- Widodo, P., Irawan, L. A., Oktavianti, I. N., & Anisa, L. (2020). Government Spending on Education, Health, and Minimum Wages As Predictors of Human Development Index: Study of Selected Provinces of Indonesia. *International Journal of Advanced Economics*, 1(2), 95–101. <https://doi.org/10.51594/ijae.v1i2.57>
- Yunianti, R. dan. (2020). *Analysis of the Effect of Industrial Agglomeration , Economic Growth , Human Development Index (Hdi), and Open Unemployment Rate*. 22(1), 1–9.
- Yusuf, L. A., & Dai, S. I. (2020). *The Impact of Unemployment and Human Development Index on Poverty in Gorontalo Province 2008-2017*. 2(1), 7–16.